

PROGRAM DAN KEGIATAN APBD BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2025

➤ APBD Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)
I. Program Penunjang Urusan Pemerintah	647.891.988,-
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.565.500,-
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.916.488,-
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.108.012,-
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.980.000,-
II. Program Pemerintah dan Otonomi Daerah	1.091.774.34,-
1. Fasilitas Penataan Wilayah	70.000.000,-

2. Pelaksanaan Otonomi Daerah	618.834.347,-
3. Fasilitasi Kerjasama Daerah	402.940.000,-
III. Program Kesejahteraan Rakyat	7.060.792.353,-
1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	5.415.000.000,-
2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	893.225.653,-
3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	752.566.700,-
Total Anggaran	8.903.300.000,-

Terdiri dari : - 3 (Tiga) Program
- 11 (Sebelas) Kegiatan

ALOKASI ANGGARAN DAN BELANJA DANA DEKONSENTRASI BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Sekretariat Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dengan Program :

- Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa
- Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerja Sama Daerah

Alokasi anggaran murni sebesar Rp.1.998.927.000,- akan tetapi sudah di efisiensi.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2025:

I. PROGRAM URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

II. PROGRAM PEMERINTAH DAN OTONOMI DAERAH:

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- b. Fasilitasi Kerja Sama Daerah.

III. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

- a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual
- b. Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
- c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar